

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Sejarah Partai Golongan Karya**

Sejarah Partai Golongan Karya (GOLKAR) bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLKAR di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. SEKBER GOLKAR didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR).

SEKBER GOLKAR didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. SEKBER GOLKAR ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. SEKBER GOLKAR ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama SEKBER GOLKAR adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965.

Jumlah anggota SEKBER GOLKAR ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota SEKBER GOLKAR dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional SEKBER GOLKAR adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula

anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam SEKBER GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan keayaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: (1) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro); (2) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi); (3) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR); (4) Karya Profesi; (5) Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam); (6) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (Gakari); dan (7) Karya Pembangunan.

Ke- 7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari SEKBER GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, SEKBER GOLKAR ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.

Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR. Hasilnya di luar dugaan.

GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 SEKBER GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR.

GOLKAR menyatakan diri bukan partai politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka SEKBER GOLKAR, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI), kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya GOLKAR dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru.

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan GOLKAR. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader GOLKAR. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap GOLKAR lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu GOLKAR yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pemegang. Kemenangan GOLKAR selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir.

Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada GOLKAR. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka GOLKAR juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu GOLKAR dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR. Saat itu GOLKAR juga mengusung citra sebagai GOLKAR baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan GOLKAR dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum GOLKAR yang cukup legendaris.

Partai GOLKAR kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai GOLKAR mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun pada pemilu berikutnya GOLKAR kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 GOLKAR menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.

Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai GOLKAR kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, dan pada pemilu 2014, posisi Partai Golkar tetap menempati posisi ke-2 tetapi dengan penurunan suara partai sehingga kehilangan 16 kursi, lalu pada pemilu legislatif 2019, Partai Golkar turun ke posisi ke-3 dan kehilangan 6 kursi legislatif.

### **2.1.1 Visi Partai Golongan Karya**

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (the founding fathers) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

### **2.1.2 Misi Partai Golongan Karya**

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

### **2.1.3 Tujuan dan Fungsi Partai Golongan Karya**

Partai GOLKAR bertujuan :

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945;
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Partai GOLKAR menyelenggarakan fungsi:

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- A. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan integritas, jejak rekam dan kesetaraan.

#### **2.1.4 Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban**

Struktur Organisasi Partai GOLKAR terdiri atas tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat



Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif yang memiliki wewenang :

1. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR mengesahkan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi
3. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi
4. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Dewan Pimpinan Pusat selain memiliki wewenang juga memiliki kewajiban, kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.

## **2.2 Tipologi Kader Partai Golkar**

Setiap organisasi perkumpulan masa berisi orang-orang dengan karakteristik yang berbeda-beda dan menghasilkan output yang berbeda-beda juga dalam bersikap, perbedaan-perbedaan yang dimiliki para kader ini harus dipetakan oleh partai demi memanfaatkan secara efektif kekuatan kader dalam menjalankan dinamika partai politik.

Dalam hal ini, Partai Golkar menetapkan tipologi kader dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda yang dibagi dalam 5 Topologi Kader menurut materi orientasi fungsionaris pusat Partai Golkar yang dibuat oleh Lembaga Pengelola Kaderisasi Partai Golkar, yaitu:

### **2.2.1 Kader Penggerak Partai**

Kader Penggerak Partai merupakan pengurus tingkat pusat sampai desa yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi kepartaian dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mobilitas partai, sasaran dari tipologi kader penggerak partai adalah melakukan tugas dan fungsi kepartaian guna meningkatkan kapasitas, mobilitas dan efektifitas partai dalam mencapai tujuannya

Target dari tipologi ini adalah para pimpinan partai ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa, lalu anggota FPG sesuai tingkatannya, para

pimpinan dari ormas-ormas yang membentuk Partai Golkar, pimpinan organisasi yang menjadi sayap Partai Golkar, serta para fungsionaris partai.

### **2.2.2 Kader Fungsional**

Kader Fungsional merupakan kader yang ditugaskan dan berada pada kelompok-kelompok masyarakat (professional dan fungsional). Kader ini terutama bertugas meluaskan basis dukungan di berbagai organisasi dan kelompok di masyarakat dalam rangka kemenangan Pemilu.

Sasaran dari Kader Fungsional yaitu melakukan tugas-tugas penggalangan dan aksi-aksi simpati guna memperluas basis massa dan meningkatkan citra partai dengan memanfaatkan potensi kelompok-kelompok fungsional.

Target dari tipologi ini adalah kelompok-kelompok fungsional seperti Tani, Nelayan, Pekerja, Pemuda, Perempuan, Rohaniawan, Intelektual, Pers dan Media Massa, dan kelompok-kelompok profesi lainnya yang tergabung dalam fungsi elektoral.

### **2.2.3 Kader Penggerak Pemerintahan**

Kader Penggerak Pemerintahan merupakan kader yang menduduki berbagai jabatan di pemerintahan atau jabatan publik dalam berbagai tingkatan yang bertugas mengelola pemerintahan dan melaksanakan kebijakan partai. Kader Penggerak Pemerintah melakukan fungsi pemerintahan dan kebijakan yang sejalan dengan visi dan misi partai. Target grup dari tipologi Kader Penggerak Partai adalah Kader Partai Golkar yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan dan kenegaraan seperti menteri, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil

walikota, bupati dan wakil bupati, dan anggota FPG dari semua jenjang lembaga perwakilan.

#### **2.2.4 Kader Karakterdes**

Kader Karakterdes atau yang dikenal sebagai Kader Penggerak Territorial Desa adalah Kader Partai Golkar di desa atau kelurahan yang ditugaskan untuk membangun citra dan memperluas basis dukungan partai serta menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan.

Sasaran dari Kader Penggerak Territorial Desa adalah melakukan aksi simpatik untuk memperluas basis massa dan mempertinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Target group dari Kader Penggerak Territorial Desa adalah Anggota POKKAR (Kelompok Karya), Kader Ormas yang berkedudukan di desa atau kelurahan, simpatisan Partai Golkar, Pemilih Pemula, Anggota dari kelompok fungsional yang ada di desa atau kelurahan.

#### **2.2.5 Kader Penggalang**

Kader Penggalang adalah kader yang berusia muda dan ditugaskan untuk membangun jejaring penggalangan demi memperluas basis dukungan partai, sasaran dari Kader Penggalang yaitu mengembangkan jaringan penggalangan guna memperluas basis massa dan mempertinggi kepercayaan masyarakat pada Partai Golkar. Target group dari Kader ini adalah Anggota Partai Golkar yang berusia 17-35 tahun.

## **2.3 Dasar-Dasar Pemikiran**

Partai Golkar memiliki dasar-dasar pemikiran yang menjadi nilai-nilai utama bagi Partai Golkar yang diterapkan untuk doktrinasi bagi para kader Partai Golkar,

### **2.3.1 Hakekat Karya**

1. Karya pada hakekatnya adalah fungsi hidup manusia. Manusia hidup untuk berkarya, dan berkarya karena manusia hidup. Maka Karya bersifat kodrati dan Karya itulah hidup yang sesungguhnya. Dengan demikian Karya adalah kegiatan kodrati manusia sesuai dengan kehendak PenciptaNya.
2. Melalui Karya, baik rokhaniah maupun jasmaniah manusia mengatur dan mengolah alam hingga semakin berkembang menjadi tempat yang layak serta sesuai bagi dirinya. Sebaliknya alam yang telah diolah membantu manusia mengembangkan kesempurnaan dirinya. Dengan demikian Karya adalah dialog antara manusia dengan lingkungan secara timbal balik sehingga membahagiakan manusia sebagai umat, manusia sebagai kelompok, dan manusia sebagai pribadi.
3. Kebahagiaan tersebut ditimbulkan karena Karya sendiri adalah sumber kegairahan dan harus diselenggarakan demikian rupa sehingga benar-benar membahagiakan manusia dalam segala matranya.
4. Karya selalu menuntut kemauan, ketekunan, usaha dan tenaga manusia, maka Karya dalam dinamika hidup biasanya membawa kesukaran dan pengorbanan.

Namun demikian kesukaran dan pengorbanan itu justru merupakan tantangan bagi manusia yang apabila dilalui dengan penuh pengertian dan kesadaran akan meningkatkan nilai Karya itu sendiri.

1.Karya sekaligus memiliki sifat sosial dan sifat perorangan yang saling berkaitan. Maka setiap Karya selalu berguna bagi masyarakat dan mempunyai arti bagi diri sendiri. Kenyataan ini berlaku dengan sendirinya secara timbal balik. Oleh karena itu fungsi sosial merupakan sifat yang melekat pada Karya.

2.Karena Karya adalah kegiatan kodrati manusia, maka Karya menjadi kewajiban setiap orang, baik dengan balas jasa ataupun tidak, dan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terciptalah keseimbangan yang serasi antara kewajiban dan hak, serta antara keperluan dan pengorbanan.

3.Sebagai konsekuensi dan kewajiban setiap orang untuk berkarya, maka pengangguran adalah hal yang tidak wajar dan harus diatasi sekuat tenaga.

4.Karya dengan demikian adalah kegiatan kodrati manusia yang diabdikan kepada penyempurnaan hubungan pribadi manusia dengan PenciptaNya, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Dengan berkarya manusia meningkatkan Kesejahteraannya, dan dalam Karya itu sendiri tersimpul pengertian keseimbangan yang serasi yang mengarah pada perwujudan Keadilan Sosial.

### **2.3.2 Karya di dalam Pancasila**

Dasar pemikiran tentang Karya yang merupakan kegiatan kodrati manusia tersebut untuk dapat diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus

ditempatkan di atas landasan Pancasila dan dengan demikian juga diatur dalam kesatuan tatanan Undang Undang Dasar 1945. Dengan penempatan Karya yang demikian dihasilkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

1. Dalam rangka Sila KETUHANAN YANG MAHA ESA Karya adalah tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada UmatNya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehingga di samping tujuan duniawi, Karya mempunyai tujuan akhirat. Dengan demikian Karya baik rokhaniah maupun jasmaniah adalah pelaksanaan pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dalam rangka Sila KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Karya harus dinilai menurut norma-norma kemanusiaan. Karena manusia diciptakan sebagai satu Umat, maka Karya yang bersifat perorangan harus juga berguna untuk sesama, dan melalui sesama berguna bagi Bangsa dan Negara serta akhirnya berguna bagi seluruh Umat Manusia. Setiap Karya yang melayani sesama manusia harus pula sesuai dengan martabat manusia. Tidak ada Karya yang hina atau rendah selama berguna bagi sesama manusia. Syarat- syarat Karya dengan sendirinya juga harus sesuai dengan martabat manusia dalam arti harus dapat meningkatkan kebahagiaan manusia. Dengan demikian Karya harus menjamin perkembangan pribadi, hasil Karya harus memuaskan manusia itu sendiri maupun sesamanya, sedangkan balas jasa harus memadai bagi pemeliharaan pribadi Karyawan, keluarga dan hari depannya.
3. Dalam rangka Sila PERSATUAN INDONESIA Karya harus diatur sedemikian rupa sehingga semakin mempersatukan Bangsa dan memperkuat Negara, sebab

pada dasarnya Karya itu tidak mempertentangkan manusia satu dengan lainnya dengan menumbuhkan perbedaan perlakuan atas dasar jenis, kesukuan, kedaerahan, keagamaan serta kedudukan sosial. Karya dengan demikian tidak boleh menimbulkan jurang perbedaan antar golongan- golongan masyarakat, serta tidak mengenal perbedaan kelas dalam masyarakat. Oleh karena itu Karya harus dapat memupuk kerjasama yang erat diantara kelompok-kelompok jenis kerja dan/atau lingkungan kerja dalam satu koordinasi yang wajar. Dalam pengertian demikian maka Karya itu bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.

4. Dalam rangka Sila KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN Karya selayaknya harus diatur melalui tata cara Musyawarah untuk Mufakat. Oleh karena itu setiap pertentangan yang mungkin timbul di antara kelompok-kelompok Karya tidak dapat diselesaikan secara paksaan sepihak, karena paksaan sepihak pada dasarnya merugikan tujuan akhir dari segala Karya, yaitu Kesejahteraan Umum. Sebaliknya, penyelesaian yang berat sebelah juga bertentangan dengan perwujudan Keadilan Sosial.

5. Dalam rangka Sila KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA maka Kesejahteraan Umum yang dicapai melalui Karya bersama harus dapat dinikmati bersama secara seimbang dan merata. Seimbang berarti bahwa pembagian untuk masing-masing pihak sesuai dengan fungsi karya dan karyanya, sedang merata berarti tidak dibenarkan adanya jurang perbedaan yang sangat menyolok. Di sinilah dicita-citakan keseimbangan yang serasi dalam masyarakat, atau disebut cita-cita Masyarakat Adil dan Makmur rokhaniah dan



jasmaniah berdasarkan Pancasila. Keadilan Sosial juga mengandung pengertian bahwa Karya harus dilaksanakan bersama dan untuk kepentingan bersama. Dalam hubungan ini maka khususnya yang lebih ahli dan lebih kuat justru memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta meningkatkan yang kurang ahli dan yang lemah. Namun demikian Keadilan Sosial hanya dapat dicapai melalui perjuangan yang dalam tahap pendahuluan menuntut pengorbanan yang berat dari setiap warga masyarakat.

### **2.3.3 Hakekat Kekaryaan**

1. Dengan dasar pemikiran tentang Karya dan hubungannya dengan Pancasila tersebut Kekaryaan berarti suatu prinsip perjuangan untuk mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial dalam Masyarakat Bangsa Indonesia di atas landasan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang dilaksanakan dengan pemberian Dharma Bhakti dalam bentuk Karya sesuai dengan jenis kerja dan/atau lingkungan kerja.
2. Kekaryaan adalah Prinsip Perjuangan Golongan Karya dalam memelopori dan melaksanakan pengisian Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pembentukan Masyarakat Adil dan Makmur rokhaniah dan jasmaniah berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

### **2.3.4 Kekaryaan Adalah Tuntutan Jaman**

1. Telah menjadi kenyataan bahwa pengelompokan politis yang hanya didasarkan atas tingkatan sosial kelas, aliran, agama dan/atau kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan golongan ethnics akan menimbulkan pertentangan-pertentangan yang berlarut-larut.

2. Kekaryaan merupakan satu-satunya kemungkinan yang baik yang dapat menyalurkan persamaan-persamaan kepentingan dan mengatasi pertentangan-pertentangan kepentingan yang ada dalam masyarakat secara kreatif. Pengelompokan yang terjadi atas dasar Kekaryaan merupakan bentuk pengelompokan yang sesuai dengan kodrat manusia serta tuntutan jaman.
3. Kekaryaan merupakan saluran yang kreatif sebab berintikan pembagian kerja yang jelas antar masing-masing bentuk pengabdian yang didasarkan atas hasil daya, cipta, karsa serta karya. Melalui kekaryaan juga pola hubungan timbal balik dapat diselaraskan ke arah pemenuhan keperluan umum secara serasi.

### **2.3.5 Masyarakat Kekaryaan**

1. Perkembangan setiap masyarakat adalah rangkaian kenyataan-kenyataan sosiologis yang tercermin dalam hubungan timbal balik antar perorangan dan antar kelompok. Sedang corak hubungan timbal balik yang menjadi dasar perkembangan itu berpangkal pada bentuk pengelompokan perorangan, baik yang berbentuk secara naluriah maupun yang berbentuk berdasarkan perencanaan.
2. Pada saat pengelompokan dalam masyarakat mulai didasarkan atas Kekaryaan maka tingkatan-tingkatan sosial kelas, aliran agama dan/atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ataupun antar golongan ethnics, tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran obyektif. Hal itu disebabkan karena kekaryaan tidak mengenal pertentangan antar tingkatan sosial antar kelas, antar aliran,

antar agama/atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ataupun antar golongan etnis, sebab telah berhasil menumbuhkan ukuran-ukuran baru yang memungkinkan terjalinnya hubungan timbal balik yang kreatif serta mampu menyelaraskan kepentingan-kepentingan khusus setiap kelompok dalam keserasian kepentingan umum seluruh masyarakat.

3. Dengan demikian masyarakat kekaryaan mendasarkan diri pada hubungan timbal balik antar kelompok-kelompok karya sesuai dengan jenis kerja dan/atau lingkungan kerja masing-masing yang diarahkan pada kesejahteraan yang adil bagi seluruh anggota Masyarakat.
4. Dengan pola hubungan serupa itu akan dapat ditumbuhkan tata cara dalam orientasi dan tindakan di mana struktur kekuasaan dalam masyarakat bukan lagi merupakan hasil pertentangan antar golongan tetapi merupakan hasil pengaturan antar kekaryaan.
5. Pola pengaturan demikian adalah sesuai dengan aspirasi Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi asas-asas keselarasan dan keseimbangan. Asas ini terwujud dalam permusyawaratan untuk mufakat, Gotong royong, Dayaguna dan Hasil guna yang pada akhirnya akan mewujudkan proses pemerataan dari hasil Pembangunan.